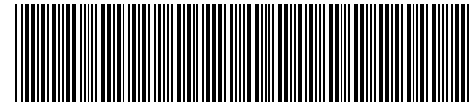




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408897/2021**



DS:5308-8475-6090-0055

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. Provinsi | : (21) | MALUKU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408897) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON |
| Sebesar | : Rp. | 204.000.000 (DUA RATUS EMPAT JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	204.000.000
Rp.	204.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	204.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN A M B O N | (061) Rp. | 204.000.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408897/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5308-8475-6090-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408897) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			204.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			204.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	20,00	Rekomendasi Kebijakan	181.135.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	20,00	Rekomendasi Kebijakan	181.135.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	22,00	Orang	22.865.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	22,00	Orang	22.865.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

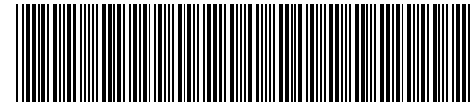
ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408897/2021

I B. SUMBER DANA



DS:5308-8475-6090-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (21) MALUKU
 Kode>Nama Satker : (408897) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : I B. 1

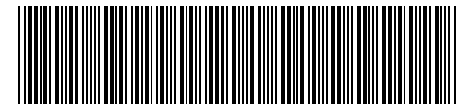
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	204.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	204.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408897/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5308-8475-6090-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408897) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408897	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	-	204.000	-	-	-	204.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	204.000	-	-	-	204.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	204.000	-	-	-	204.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (21.51 MALUKU / KOTA AMBON)	-	181.135	-	-	-	181.135	21 . 51	
01	RM	-	181.135	-	-	-	181.135	061	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (21.51 MALUKU / KOTA AMBON)	-	22.865	-	-	-	22.865	21 . 51	
01	RM	-	22.865	-	-	-	22.865	061	
JUMLAH		-	204.000	-	-	-	204.000		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408897/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5308-8475-6090-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408897) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

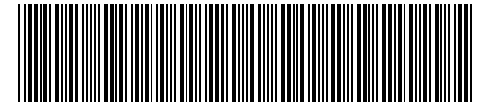
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408897	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.014	11.948	36.664	33.164	4.577	6.692	18.332	30.869	54.120	2.613	1.000	2.007	204.000
		BELANJA BARANG	2.014	11.948	36.664	33.164	4.577	6.692	18.332	30.869	54.120	2.613	1.000	2.007	204.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	2.014	11.948	36.664	33.164	4.577	6.692	18.332	30.869	54.120	2.613	1.000	2.007	204.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.014	11.948	36.664	33.164	4.577	6.692	18.332	30.869	54.120	2.613	1.000	2.007	204.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408897/2021
IV A. B L O K I R**



DS:5308-8475-6090-0055

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [408897] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

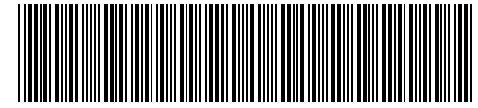
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408897/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:5308-8475-6090-0055

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [408897] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001